

## **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP**

**Emy Dwi Trisnani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ  
emydwitrisnani@gmail.com

**Moh. Dimiyati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ  
dim\_ekounej@yahoo.co.id

**Hadi Paramu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ  
hadi.feb@unej.ac.id

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of Internal Control System (SPI) on the reliability of financial statements, with fixed assets administration as the intervening variable, in the Government of Bondowoso Regency. Data were analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM). Results shows that Internal Control System has a significant positive effect on the reliability of financial statements and fixed assets administration, fixed assets administration has a significant positive effect on the reliability of financial statements, and the fixed assets administration has a significant role in mediating the effect of Internal Control System on the reliability of financial statements.*

**Keywords:** *SPI, Administration of Fixed Assets, Financial Statements Reliability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap keandalan laporan keuangan dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel *intervening* pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan dan penatausahaan aset tetap, penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan, penatausahaan aset tetap mempunyai peranan penting dalam memediasi pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan.

**Kata Kunci:** SPI, Penatausahaan Aset Tetap, Keandalan Laporan Keuangan.

### **Pendahuluan**

Manajemen pada instansi pemerintah harus memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD). Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi dalam laporan

keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa keandalan adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi laporan keuangan juga harus lengkap dengan mempertimbangkan materialitas dan biaya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus dapat diandalkan agar bermanfaat bagi para pengguna, maka harus disusun berdasarkan SPI yang baik. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, intansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada didalamnya) didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasional (Bastian, 2014: 253). SPI yang baik diharapkan meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Karmila, dkk. 2014).

Neraca adalah salah satu komponen LKPD yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset tetap merupakan unsur neraca yang mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan unsur neraca lainnya (Halim dan Kusyufi, 2014: 305). Aset tetap harus disajikan secara transparan dan akuntabel pada LKPD maka perlu adanya penatausahaan aset tetap. Penatausahaan adalah kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan aset tetap suatu entitas yang akurat dan informatif. Penatausahaan aset tetap merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah maka harus dilaksanakan berdasarkan SPI yang memadai. Harrison dkk. (2011: 235) juga menyatakan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi merupakan informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan maka perlu adanya SPI yang layak untuk memastikan catatan akuntansi akurat dan dapat diandalkan. Penatausahaan yang tertib akan berdampak pada tersedianya database yang memadai sehingga menghasilkan laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2016 atas 533 LKPD Tahun Anggaran 2015 mengungkapkan adanya kelemahan SPI sebanyak 6.150 temuan yang terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK RI juga mengungkapkan terdapat 118 pemerintah daerah yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena adanya permasalahan ketidaksesuaian

penyajian aset tetap dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). Hasil temuan BPK RI ini menunjukkan bahwa kelemahan SPI dan penyajian aset tetap yang tidak sesuai dengan SAP mengakibatkan laporan keuangan belum disajikan secara andal.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban menyusun LKPD. Aset tetap merupakan komponen yang cukup besar dalam LKPD Kabupaten Bondowoso dengan prosentase lebih dari 80%. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 mengungkapkan bahwa penatausahaan aset yang dilakukan oleh SKPD belum tertib yaitu pembukuan/pencatatan sebagian aset tetap tanah belum informatif dan penyajian aset tetap belum lengkap dan andal. Permasalahan penatausahaan aset tetap tersebut disebabkan SKPD belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap sehingga nilai aset tetap pada neraca belum disajikan secara andal (BPK RI, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan, pengaruh SPI penatausahaan aset tetap, pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis komparasi pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat akan memberikan sinyal kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika, dkk. 2016). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani dan Tahar, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan SPI adalah keandalan laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari kesesuaian dengan SAP dan SPI, maka pemerintah daerah harus mendesain dan melaksanakan SPI yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan. Hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015), Widyaningsih dkk. (2011), Desmiyawati (2014), dan Sari dan Witono (2014) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H<sub>1</sub>: SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari SPI yaitu memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui pengamanan administrasi aset daerah. Penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan pengamanan administrasi aset tetap maka harus ditangani dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan SPI yang memadai agar tercipta transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Bleskadit (2015) dan Bangun (2012) menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penatausahaan aset tetap. Hal ini berarti peningkatan SPI akan meningkatkan penatausahaan aset tetap sebaliknya melemahnya SPI akan menurunkan proses penatausahaan aset tetap daerah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap

Keandalan informasi LKPD salah satunya ditentukan oleh keakuratan penyajian aset tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa hasil penatausahaan aset tetap digunakan sebagai dasar menyusun neraca pemerintah daerah dan mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga laporan keuangan dapat diandalkan. Penelitian Tangke dkk. (2015), Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013) menunjukkan bahwa penatausahaan aset berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. maka hipotesis yang ketiga adalah :

H<sub>3</sub> : Penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

## Metodologi

Rancangan penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2015: 38). Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan responden Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu kedalam beberapa strata dan setiap kelompok digunakan sebagai unit pemilihan sampel yang dilakukan secara random (Noor, 2015: 152).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, yaitu memberikan secara langsung sejumlah pernyataan tertulis secara berstruktur kepada responden berkaitan dengan tanggapannya terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri variabel eksogen yaitu SPI, variabel intervenig yaitu penatausahaan aset tetap dan variabel endogen yaitu keandalan laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern adalah persepsi responden terhadap proses yang dijalankan oleh SKPD untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan. Variabel SPI diukur dengan 18

indikator yang mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Penatausahaan aset tetap adalah persepsi responden terhadap kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap pada SKPD. Variabel Penatausahaan aset tetap diukur dengan 5 indikator mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Keandalan laporan keuangan adalah persepsi responden tentang informasi dalam laporan keuangan yang menyajikan setiap fakta secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi. Variabel keandalan laporan keuangan diukur dengan 8 indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menguji hipotesis yang diajukan adalah *Structural Equation Modeling (SEM)*. Sebelum dilakukan analisis data dengan *Structural Equation Modelling (SEM)*, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data yang penelitian dan uji asumsi SEM. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) pada masing-masing variabel laten. Indikator-indikator dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai loading factor 0,5 (Ghozali, 2014: 138). Uji reliabilitas dengan menghitung *Construct Reliability*, jika nilai *Construct Reliability* 0,70 atau lebih maka suatu variabel dinyatakan reliabel (Ghozali, 2014: 140).

Prasyarat yang harus dipenuhi adalah asumsi SEM adalah tidak terjadi outlier, multivariat normal, dan tidak terjadi multikolinieritas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai statistik z untuk *skewness* dan kurtosisnya dan secara empirik dapat dilihat *Critical Ratio (CR) skewness value*. Jika digunakan tingkat signifikan 5%, maka nilai CR yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96 dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel eksogen sehingga uji multikolinieritas tidak digunakan dalam uji asumsi SEM. Deteksi terhadap multivariat outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai *mahalanobis distance*, berdasarkan nilai *Chi-square* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada tingkatan signifikan  $p < 0,05$  (Ghozali, 2014: 227).

## Hasil dan Pembahasan

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 164 responden, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sampelnya sebanyak 118 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih SKPD secara random, setiap SKPD yang terpilih mempunyai 3 calon responden kemudian kuesioner diberikan secara langsung kepada responden sebanyak 118 kuesioner sehingga seluruh kuesioner yang diberikan terisi secara lengkap dan dapat diolah. Sebagian besar responden berada pada usia sangat produktif yaitu rentang usia 31 – 50 tahun (74,65%) dan memiliki masa kerja diatas 15 tahun (50,8%). PPK dan Pengurus Barang sebagian besar adalah pria sedangkan Bendahara Pengeluaran sebagian besar adalah wanita. PPK sebagian besar berpendidikan S2

(19,5%), Bendahara Pengeluaran sebagian besar berpendidikan S1 (17,8%) sedangkan Pengurus Barang mayoritas memiliki tingkat pendidikan SLTA (22%). Mayoritas Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang sering mengikuti bimbingan teknis (45,8%) berbeda dengan PPK yang cenderung jarang mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah (13,6%).

### Analisis Data

Hasil uji validitas dengan *confirmatory factor analysis* untuk konstruk SPI terdapat 9 dari 18 indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0,5, konstruk penatausahaan aset tetap dari 5 indikator ada satu indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0,5 dan konstruk keandalan laporan keuangan dari 8 indikator ternyata ada dua indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0,5. Indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0,5 tersebut harus dibuang karena tidak valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai reliabilitas konstruk SPI sebesar 0,872, penatausahaan aset tetap sebesar 0,807, dan keandalan laporan keuangan sebesar 0,889. Nilai reliabilitas konstruk tersebut berada diatas nilai minimal yang disyaratkan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel penelitian adalah reliabel.

Hasil uji normalitas semua indikator mempunyai nilai *Critical Ratio (CR) skewness* berada antara -1,96 sampai dengan 1,96 sehingga data secara univariat terdistribusi secara normal. Uji normalitas *multivariate* memberikan nilai -1,688 yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96, ini menunjukkan data multivariat normal. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal secara univariat dan multivariat. Uji outlier dalam penelitian ini adalah berdasarkan nilai *Chi-square* pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) 19 yaitu jumlah indikator (*observed variable*) pada tingkat signifikansi  $p < 0,05$ . Nilai *mahalanobis distance*  $X^2 (0,05;19)$  adalah sebesar 30,144. Hasil uji outlier menunjukkan tidak ada data yang memiliki nilai *mahalanobis distance* lebih besar dari 30,144 dan memiliki nilai  $p > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat *multivariate outliers* dalam data yang dianalisis.

Uji validitas dan reliabilitas dan uji asumsi SEM telah dilakukan pada semua variabel laten dan memberikan hasil valid dan reliabel, data multivariate normal, tidak terjadi data *outliers* maka langkah selanjutnya dilakukan uji kesesuaian model dan uji kausalitas. Hasil pengujian kesesuaian model didapatkan nilai Chi square 120,953 dengan probabilitas sebesar 0,955 yang jauh di atas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model telah fit terhadap data. Jika dilihat dari kriteria fit yang lain nilai yaitu CMIN/DF 0,812, GFI 0,905, RMSEA 0,000, TLI 1,032, dan CFI 1,000 sudah memenuhi standar yang direkomendasikan dan AGFI 0,879 masih dibawah nilai yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima karena ada kesesuaian antara model dengan data.

Uji kausalitas digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausalitas antar variabel laten (konstruk). Uji kausalitas dilakukan setelah uji asumsi SEM dan uji kelayakan model SEM terpenuhi. Hasil pengujian kausalitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian kausalitas

Variabel	Koefisien Jalur	C.R	Probabilitas	Keterangan
SPI → KLK	0,366	5,304	***	Signifikan
SPI → PAT	0,672	3,374	***	Signifikan
PAT → KLK	0,632	4,769	***	Signifikan

\*\*\* Signifikan pada 0,01

Sumber: Data primer diolah dengan *software Amos*

### Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Laporan Keuangan

Hasil uji kausalitas pada Tabel 1 menunjukkan koefisien jalur dari pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 0,366 dan bernilai positif, dengan nilai *Critical Ratio* (CR) > 2,58 dan probabilitas signifikan yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang disyaratkan sebesar 0,01. Hasil analisis data membuktikan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti SPI yang memadai akan meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan sebaliknya jika SPI semakin lemah maka akan menurunkan keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bermakna apabila pimpinan SKPD bersikap responsif dan berperan serta dalam proses pelaporan keuangan, pegawai pengelola keuangan dan aset tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal akan mendorong penyajian laporan keuangan yang wajar dan lengkap sesuai dengan SAP. Transaksi telah diotorisasi oleh pegawai yang berwenang, dicatat secara akurat dan tepat waktu, dokumen dan catatan akuntansi lengkap dan akurat akan memudahkan proses verifikasi atas informasi yang disajikan dalam LKPD. Hasil analisis ini membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan diterima.

Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja diatas 15 tahun baik PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang mengindikasikan bahwa responden telah memahami pentingnya penerapan unsur SPI secara efektif dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan SKPD. Hasil penelitian ini membuktikan Teori Sinyal (*Signaling Theory*), PP Nomor 60 tahun 2008 dan mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afiah dan Azwari (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningsih dkk. (2011),

dan Desmiyawati (2014) yang menyimpulkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

### Sistem Pengendalian Intern dan Penatausahaan Aset Tetap

Hasil uji kausalitas pada Tabel 1 menunjukkan koefisien jalur dari pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap 0,672 dan bernilai positif, dengan nilai *Critical Ratio* (CR) > 2,58 dan probabilitas signifikan yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang disyaratkan sebesar 0,01. Hasil analisis data membuktikan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti SPI yang memadai akan mendorong pelaksanaan penatausahaan secara tertib, dan sebaliknya jika SPI semakin lemah maka akan menurunkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap. Hasil penelitian ini bermakna bahwa pengendalian atas penggunaan aset tetap oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang dilakukan secara optimal, pendelegasian tugas pengurus barang pada pegawai yang kompeten, adanya pemantauan atas pelaksanaan tugas Pengurus Barang, aset tetap dilengkapi dengan bukti kepemilikan, rekonsiliasi aset tetap secara berkala dengan pembantu pengelola aset daerah akan mendorong penatausahaan aset tetap semakin tertib. Hasil analisis ini membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap diterima..

Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan Pengurus Barang sebagian besar adalah pria. Responden dengan karakteristik tersebut cenderung mampu melaksanakan tugasnya secara optimal dan menunjukkan pentingnya penerapan SPI dalam penatausahaan aset tetap.

Temuan ini mendukung PP Nomor 60 Tahun 2008 yang berkaitan dengan salah satu tujuan dari SPI yaitu memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui pengamanan administrasi aset daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bleskadit (2015) dan Simamora dan Halim (2012) yang menyimpulkan bahwa SPI merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap.

### Penatausahaan Aset Tetap dan Keandalan Laporan Keuangan

Hasil uji kausalitas menunjukkan koefisien jalur dari pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan 0,362 dan bernilai positif, dengan nilai *Critical Ratio* (CR) > 2,58 dan probabilitas signifikan yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yang disyaratkan sebesar 0,01. Hasil analisis data membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti penatausahaan aset tetap yang tertib akan meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan sebaliknya jika penatausahaan aset tetap kurang baik maka akan



menurunkan keandalan laporan keuangan. Hal ini bermakna bahwa pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) secara lengkap dan akurat, inventarisasi yang optimal, dan pelaporan yang tepat waktu akan berdampak pada penyajian aset tetap di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta terkait dengan karakteristik responden yaitu Pengurus Barang sering mengikuti bimbingan teknis atau diklat tentang pengelolaan aset tetap. Pengurus Barang dengan karakteristik tersebut cenderung dapat melaksanakan administrasi penatausahaan aset tetap secara tertib. Hasil analisis ini membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan diterima.

Temuan ini membuktikan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan mendukung hasil penelitian Tangke dkk. (2015), Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013) yang menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

### Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh langsung terjadi antara variabel laten SPI terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan, penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan sebesar koefisien jalur dari masing-masing variabel sebagaimana disajikan Tabel 1. Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan bahwa SPI mempunyai pengaruh langsung lebih kecil terhadap keandalan laporan keuangan yaitu sebesar 0,366 jika dibandingkan dengan pengaruh langsung penatausahaan aset tetap terhadap laporan keuangan yaitu sebesar 0,632. SPI mempunyai pengaruh terbesar terhadap penatausahaan aset tetap yaitu sebesar 0,672. Hal ini berarti SPI memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pelaksanaan penatausahaan aset tetap.

Pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini adalah pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening dalam satu model kausal. Besarnya pengaruh tidak langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 0,425. Hasil tersebut menunjukkan pengaruh tidak langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa penatausahaan aset tetap mempunyai peranan yang lebih penting dalam mempengaruhi keandalan laporan keuangan sehingga diperlukan penerapan SPI yang efektif untuk lebih meningkatkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tertib sebagai upaya peningkatan keandalan laporan keuangan.

Hal ini didukung fakta bahwa aset tetap jumlahnya paling besar dibandingkan dengan akun lainnya dalam LKPD Kabupaten Bondowoso yaitu lebih dari 80% dari total aset sehingga keakuratan dan kesesuaian penyajian aset tetap dengan SAP akan

berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa penatausahaan aset sangat penting peranannya dalam mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bangun (2015) yang menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap dapat memediasi hubungan antara SPI dengan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Simamora dan Halim (2012) yang menemukan bahwa SPI berpengaruh terhadap penatausahaan aset dan penatausahaan aset yang tertib dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. SPI berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan artinya efektifitas penerapan SPI dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. Temuan ini membuktikan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dan sesuai hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningsih dkk. (2011), dan Desmiyawati (2014).
- b. SPI berpengaruh signifikan positif terhadap penatausahaan aset tetap artinya penerapan SPI yang efektif akan mendorong pelaksanaan penatausahaan secara tertib. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Bleskadit (2015) dan Simamora dan Halim (2012).
- c. Penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan artinya semakin baik pelaksanaan penatausahaan aset tetap akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Tangke dkk. (2015), Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013).

Pengaruh tidak langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan. Hal ini berarti penatausahaan aset tetap mempunyai peranan yang lebih penting dalam mempengaruhi keandalan laporan keuangan dibandingkan pengaruh langsung SPI terhadap keandalan laporan keuangan.

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan yaitu jumlah variabel dan responden. Responden penelitian ini hanya terbatas pada pengelola keuangan dan pengelola aset tetap tidak termasuk kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan anggaran dan penggunaan barang pada SKPD yang dipimpinnya.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang pentingnya pengaruh SPI terhadap penatausahaan aset tetap dan keandalan laporan keuangan ditingkat SKPD dengan melakukan pengawasan intern, pembinaan penyelenggaraan SPI ditingkat SKPD dan reviu LKPD.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang SPI, penatausahaan aset tetap dalam kaitannya dengan keandalan laporan keuangan dengan memperluas jumlah sampel sehingga dapat dilakukan generalisasi yang lebih luas.
- c. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi terutama pada sektor publik untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat dengan menambah variabel penelitian seperti kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Afiah, N.N. dan P.C. Azwari. 2015. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government In South Sumatera. *Global Conference on Business and Social Science*. 17-18 September 2015. *Procedia-Social and Behavioral Sciences Elsevier*. 811-818.
- Bangun, V. 2015. Analisis Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. Program Study Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bastian, I. 2014. *Audit Sektor Publik*, Edisi 3., Jakarta : Salemba Empat.
- Bleskadit, E.B. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. *Tesis*. Program Study Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 2 (April): 163-178.
- Febrianti, S. 2016. Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 1 (Januari): 151-170.
- Ghozali, I. 2014. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 22.0.*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan M.S.Kusyufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah.*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison Jr, W.T., C.T. Hongren, C.W. Thomas, dan T. Suwardy. 2011. *Akuntansi Keuangan*, Edisi 8. Jilid I., Jakarta : Erlangga.

- Hendriyani, R., dan A.Tahar. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah propinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(Maret): 25-33.
- Karmila, A.R.Tanjung., dan E. Darlis. 2014. Pagaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*, 9 (April): 25-42.
- Monika, P., A.Syahroza, dan V. Diyanti. 2016. The Effect of Audit Opinion and Corruption on Local Government Performance. *Simposium Nasional Akuntansi 19*. Universitas Lampung: 1-26.
- Mukmin, Darwanis, dan S. Abdullah. 2015. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(Mei): 32-44.
- Noor, J. 2015. *Metode Penelitian.*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *SPI Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Priyono, K. 2013. Keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis aktual: Kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 4(Januari): 1-21.
- Sari, S.P. dan B. Witono. 2014. Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Seminar Nasional dan Call for Paper Research Methods and Organizational Studies*, 418-425.
- Simamora, R., dan A. Halim. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10 (Maret): 47-61.
- Tangke, J.G., Halim, dan G. Lucita. 2015. Pengaruh optimalisasi manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(April): 1-5.
- Widyaningsih, A., A. Triantoro, dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan : Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. *Simposium Nasional Akuntansi 14*. Universtas Syiah Kuala Banda Aceh: 1-35.